



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT  
KPKNL SINGKAWANG

# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 (*Audited*)

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Singkawang

Jalan Alianyang No 02  
Singkawang 79123

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan (*Audited*) TA 2023 KPKNL Singkawang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan (*Audited*) TA 2023 KPKNL Singkawang ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Singkawang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Singkawang, 12 Mei 2024  
Kepala KPKNL Singkawang



Ditandatangani secara elektronik  
Andri Dwinanto  
NIP 197511131996021001



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar .....	I
Daftar isi .....	II
Pernyataan Tanggung Jawab .....	III
Ringkasan Laporan Keuangan .....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	3
II. Neraca .....	4
III. Laporan Operasional .....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	7
A. Penjelasan Umum .....	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran .....	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	21
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	27
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	31
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya .....	32

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
SINGKAWANG**

*JALAN ALIANYANG NO 02, SINGKAWANG*

*TELEPON : (0562) 634803, FAKSIMILE : (0562) 632342, SUREL : KPKNLSINGKAWANG@KEMENKEU.GO.ID*

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan (*Audited*) Tahun Anggaran 2023 KPKNL Singkawang tingkat satker yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Singkawang, 12 Mei 2024  
Kepala KPKNL Singkawang



Ditandatangani secara elektronik  
Andri Dwinanto  
NIP 197511131996021001

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan (*Audited*) KPKNL Singkawang TA 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.471.554.290,00 atau mencapai 102,79% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.404.542.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.435.616.889,00 atau mencapai 89,28% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.608.014.000,00.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp18.061.415.077,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.454.592,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp18.058.960.485,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp185.539.500,00; Akumulasi Penyusutan sebesar Rp185.539.500,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp8.326.495,00 dan Rp18.053.088.582,00.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.466.403.290,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.858.882.412,00, sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp607.520.878,00. Jumlah Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp5.041.000,00, sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar Rp612.561.878,00.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp18.212.234.743,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp612.561.878,00, transaksi antar entitas senilai (Rp771.708.039,00), sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp18.053.088.582,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGKAWANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023		% thd Angg	2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.404.542.000	2.471.554.290	102,79	2.656.272.360
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.404.542.000</b>	<b>2.471.554.290</b>	<b>102,79</b>	<b>2.656.272.360</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>Belanja Operasional</b>	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	1.608.014.000	1.435.616.889	89,28	1.328.065.591
<b>Jumlah Belanja Operasional</b>		<b>1.608.014.000</b>	<b>1.435.616.889</b>	<b>89</b>	<b>1.328.065.591</b>
<b>Belanja Modal</b>					
Belanja Peralatan dan Mesin	B.5	79.425.000	72.121.581	90,80	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.6	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>79.425.000</b>	<b>72.121.581</b>	<b>90,80</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.687.439.000</b>	<b>1.507.738.470</b>	<b>89,35</b>	<b>1.328.065.591</b>

**II. NERACA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGKAWANG  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	450.000
Persediaan	C.4	2.454.592	63.194.786
Jumlah Aset Lancar		2.454.592	63.644.786
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.5	11.793.000.000	11.793.000.000
Peralatan dan Mesin	C.6	4.261.353.102	4.389.104.123
Gedung dan Bangunan	C.7	6.660.139.494	6.660.139.494
Aset Tetap Lainnya	C.8		-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(4.655.532.111)	(4.680.878.769)
Jumlah Aset Tetap		18.058.960.485	18.161.364.848
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Lain-Lain	C.10	185.539.500	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset	C.11	(185.539.500)	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>18.061.415.077</b>	<b>18.225.009.634</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	8.326.495	12.774.891
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		8.326.495	12.774.891
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>8.326.495</b>	<b>12.774.891</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.13	18.053.088.582	18.212.234.743
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>18.053.088.582</b>	<b>18.212.234.743</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>18.053.088.582</b>	<b>18.225.009.634</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGKAWANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>		
<b>PENDAPATAN</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.466.403.290
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.466.403.290</b>
<b>BEBAN</b>		
Beban Pegawai	D.2	
Beban Persediaan	D.3	122.330.794
Beban Barang dan Jasa	D.4	761.866.002
Beban Pemeliharaan	D.5	363.913.100
Beban Perjalanan Dinas	D.6	244.248.791
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	366.523.725
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>1.858.882.412</b>
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		607.520.878
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		5.151.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		110.000
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>	D.8	5.041.000
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
SURPLUS /(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		612.561.878
<b>POS LUAR BIASA</b>		
Beban Luar Biasa	D.9	
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>612.561.878</b>

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGKAWANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023
EKUITAS AWAL	E.1	18.212.234.743
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	612.561.878
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	
PENYESUAIAN NILAI ASET		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		
SELISIH REVALUASI ASET		
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		
LAIN-LAIN		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(771.708.039)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(159.146.161)
EKUITAS AKHIR	E.5	<b>18.053.088.582</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPKNL Singkawang

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana Strategis*

KPKNL Singkawang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

KPKNL Singkawang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Melalui peran KPKNL Singkawang diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, KPKNL Singkawang berkomitmen dengan visi:

***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan transparan melalui implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.”***

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Singkawang melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
2. Memaksimalkan pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.
3. Mengembangkan sistem informasi yang andal dan terpercaya.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Singkawang. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan 31 Desember 2023 KPKNL Singkawang ini merupakan laporan tunggal, yaitu KPKNL Singkawang sebagai satker.

*Basis Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

KPKNL Singkawang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Singkawang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Singkawang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

#### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Pendapatan-LO*

### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang Jangka Panjang*

**Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset Lainnya*

**Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih*

**(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	
--	---	--

*Penyusutan Aset Tetap*

**(9) Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis Akrua  
Pertama Kali*

**(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali**

Mulai tahun 2015, Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun- akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN***Realisasi**Pendapatan**Rp2.471.554.290,00***B.1 PENDAPATAN**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.471.554.290,00 sedangkan estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 2.404.542.000,00. Pendapatan di lingkup KPKNL Singkawang berasal dari 7 sumber, yaitu Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Pendapatan Jasa berupa Bea Lelang, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan, Pendapatan Jasa Lainnya dan Pendapatan Anggaran Lainnya.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan s.d. 31 Desember 2023 dengan TA 2022*

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	6.530.548	2.268.665	187,86
Pendapatan Bea Lelang	1.685.313.830	2.023.594.463	(16,72)
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	774.058.912	627.776.750	23,30
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.151.000	1.397.000	268,72
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	1.232.500	100,00
Pendapatan Jasa Lainnya	500.000	1.982	25127,04
Pendapatan Anggaran Lainnya		1.000	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>2.471.554.290</b>	<b>2.656.272.360</b>	<b>(6,95)</b>

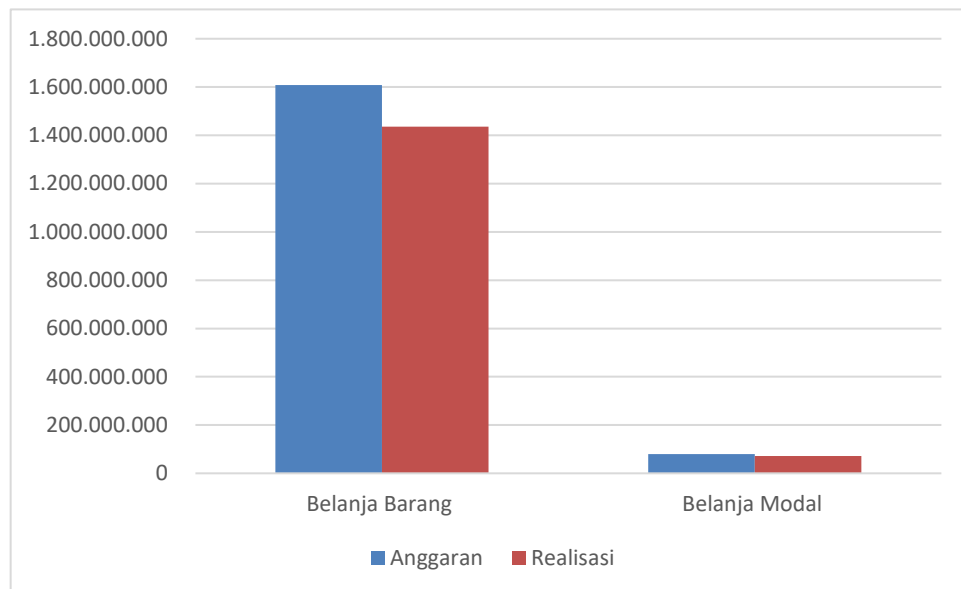
*Realisasi Belanja**Negara**Rp1.507.738.470,00***B.2. BELANJA**

Realisasi Belanja KPKNL Singkawang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.507.738.470,00 atau 89,35% dari anggaran belanja sebesar Rp1.687.439.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	1.608.014.000	1.435.616.889	89,28
Belanja Modal	79.425.000	72.121.581	0,00
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>1.687.439.000</b>	<b>1.507.738.470</b>	89,35
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Total Belanja</b>	<b>1.687.439.000</b>	<b>1.507.738.470</b>	89,35

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 13,53% dibandingkan periode pada TA 2022 hal tersebut dikarenakan pada tahun 2023 terdapat belanja modal peralatan dan mesin. Namun demikian secara keseluruhan walaupun tanpa belanja modal, realisasi belanja tetap naik dari TA 2022 yaitu sebesar 8,10%

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

Belanja Pegawai	0	0	-
Belanja Barang	1.435.616.889	1.328.065.591	8,10
Belanja Modal	72.121.581	0	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.507.738.470</b>	<b>1.328.065.591</b>	<b>13,53</b>

Belanja Pegawai  
Rp0,00

**B.3 Belanja Pegawai**

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat belanja pegawai dikarenakan

pembayaran sudah dilakukan secara terpusat pada Kantor Pusat DJKN sejak Bulan Agustus 2020.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022*

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Belanja Barang*  
Rp1.435.616.889,0  
0

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang pada TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.435.616.889,00 dan Rp1.328.065.591,00 atau mengalami kenaikan sebesar 7,57%.

*Perbandingan Belanja Barang pada TA 2023 dan 2022*

Belanja Barang Operasional	609.517.070	621.368.881	(1,91)
Belanja Barang Non Operasional	21.163.000	15.194.600	39,28
Belanja Barang Persediaan	61.590.600	81.523.027	(24,45)
Belanja Jasa	135.184.328	162.504.676	(16,81)
Belanja Pemeliharaan	363.913.100	299.031.490	21,70
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	244.248.791	148.442.917	64,54
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.435.616.889</b>	<b>1.328.065.591</b>	<b>8,10</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.435.616.889</b>	<b>1.328.065.591</b>	<b>8,10</b>

*Belanja Modal*  
*Peralatan dan*  
*Mesin*  
Rp72.121.581,00

**B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 72.121.581,00 dan Rp0,00 atau mengalami peningkatan sebesar 100% hal ini antara lain dikarenakan pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat belanja modal peralatan dan mesin.

*Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	2023	2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.121.581	0	100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>72.121.581</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>72.121.581</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

*Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan Rp0,00*

### **B.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dikarenakan pada tahun anggaran 2023 maupun 2022 tidak terdapat belanja modal gedung dan bangunan.

*Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	2023	2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0,00*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022*

Keterangan	2023	2022
Saldo UP	-	0
Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	-	0
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp0,00*

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022*

Jenis	2023	2022
Biaya Administrasi PPN	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	-	-
Dana Yang Masih Dalam Proses Identifikasi dan Konfirmasi	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas Rp0,00*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp450.000,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/ TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu

investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022*

Persediaan	2023	2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		450.000
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang belum disahkan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>450.000</b>

*Persediaan Rp  
2.454.592,00*

#### C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 2.454.592,00 dan Rp63.194.786,00. Terdapat mutasi persediaan dengan total mutasi penambahan persediaan selama periode laporan sebesar Rp61.590.600,00 dan mutasi kurang persediaan selama periode laporan Rp122.330.794,00. Nilai persediaan akhir Desember 2022 belum dilakukan stock opname sehingga terdapat saldo persediaan sebesar Rp63.194.786,00 dan stock opname baru dilakukan pada semester I TA 2023.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022*

Persediaan	2023	2022
Barang Konsumsi	2454592	63.194.786
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Pita Cukai, Materai, dan Leges	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.454.592</b>	<b>63.194.786</b>

*Tanah  
Rp11.793.000.000,  
00*

#### C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup KPKNL Singkawang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama yaitu sebesar Rp11.793.000.000,00. Nilai tanah tetap karena tidak terdapat penambahan, penilaian kembali maupun penyusutan terhadap tanah tersebut pada TA 2023. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Aset Tetap berupa Tanah*

No.	Satker	KIB	Luas	Nilai
1	KPKNL Singkawang	2010101001	336 m2	Rp 141.120.000
2	KPKNL Singkawang	2010104001	2.505 m2	Rp 11.651.880.000
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 11.793.000.000</b>

**C.6 Peralatan dan Mesin**

*Peralatan dan  
Mesin Rp  
4.261.353.102,00*

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 4.261.353.102,00 dan Rp4.389.104.123,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Peralatan dan Mesin TA 2023*

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>4.389.104.123</b>
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	72.121.581
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	209.427.518
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(409.300.120)
Penghapusan	Rp	-
Reklasifikasi Keluar	Rp	-
Koreksi Pencatatan	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>4.261.353.102</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	(3.843.220.895)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>418.132.207</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Mutasi tambah berupa pembelian antara lain:
  1. 1 (satu) unit Alat Angkut Darat Bermotor senilai Rp 24.457.581,00;

2. Alat Rumah Tangga senilai Rp 43.664.000,00; dan
3. 1 (satu) unit Alat Komunikasi senilai Rp 4.000.000,00;

- b. Mutasi tambah berupa Transfer Masuk
  1. 2 (dua) unit Alat studio senilai Rp13.778.536,00;
  2. Alat Rumah Tangga senilai Rp 2.800.000,00;
  3. Komputer Unit senilai Rp 23.500.000,00; dan
  4. Peralatan Komputer Rp 169.348.982,00

Gedung dan  
Bangunan  
Rp6.660.139.494,0  
0

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa:

- a. Penghentian Penggunaan Aset dari penggunaan berupa
  1. 2 (dua) unit Alat Angkutan Darat Bermotor senilai Rp185.539.000,00;
  2. 7 (tujuh) unit Alat Kantor senilai Rp 35.769.800,00;
  3. 10 (sepuluh) unit Alat Rumah Tangga senilai Rp 114.979.100,00;
  4. 7 (tujuh) unit Alat Komunikasi Rp 8.006.587,00;
  5. 2 (dua) unit Komputer Unit Rp 29.172.083,00;
  6. 2 (dua) unit Peralatan Komputer Rp 19.399.050,00; dan
  7. 3 (tiga) unit Alat Eksplorasi Topografi Rp 16.434.000,00.

### C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan aset tetap berupa gedung dan bangunan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sama yaitu sebesar Rp6.660.139.494,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Gedung dan Bangunan TA 2023*

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	Rp	6.660.139.494
Mutasi tambah:	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>6.660.139.494</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	(812.311.216)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>5.847.828.278</b>

Aset Tetap Lainnya  
Rp0,00

### C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu sama sebesar Rp0,00.

#### *Rincian Aset Tetap Lainnya*

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	Rp	-
Mutasi tambah:	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp(4.655.532.111)*

### C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp4.655.532.111,00 dan Rp4.680.878.769,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 4.261.353.102	Rp (3.843.220.895)	Rp 418.132.207
2	Gedung dan Bangunan	Rp 6.660.139.494	Rp (812.311.216)	Rp 5.847.828.278
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 10.921.492.596</b>	<b>Rp (4.655.532.111)</b>	<b>Rp 6.265.960.485</b>

*Aset Lain-Lain  
Rp0*

### C.10 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu masing-masing sama yaitu senilai Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup KPKNL Singkawang serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Lain-lain*

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Mutasi tambah:</b>		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
<b>Mutasi kurang:</b>		
- penghapusan BMN	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp0*

*Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp 8.326.495,00*

*Ekuitas  
Rp18.053.088.582,  
00*

### **C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sama yaitu senilai Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

### **C.12 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 8.326.495,00 dan Rp12.774.891,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

### **C.13 Ekuitas**

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 18.053.088.582,00 dan Rp18.212.234.743,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNBPNP*  
*Rp2.466.403.290,00*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.466.403.290,00 dan Rp2.653.642.860,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Uraian	2023	2022	% Real Angg.
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.466.403.290	2.653.642.860	(7,06)
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.466.403.290</b>	<b>2.653.642.860</b>	<b>(7,06)</b>

### D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai*  
*Rp0,00*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing yaitu sebesar Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Beban Persediaan*  
*Rp122.330.794,00*

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 122.330.794,00 dan Rp51.545.119,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang dan  
Jasa  
Rp761.866.002,00*

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp761.866.002,00 dan Rp811.393.048,00 . Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang dan Jasa	761.866.002	811.393.048	-6,10
<b>Jumlah</b>	<b>761.866.002</b>	<b>811.393.048</b>	<b>-6,10</b>

*Beban Pemeliharaan  
Rp363.913.100,00*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp363.913.100,00 dan Rp299.031.490,00 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	169.775.088	131.040.110	29,56
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	194.138.012	167.991.380	15,56
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>363.913.100</b>	<b>299.031.490</b>	<b>21,70</b>

*Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp244.248.791,00*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas pada untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 244.248.791,00 dan Rp148.442.917,00 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	227.868.791	124.157.917	83,53
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.380.000	24.285.000	-32,55
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>244.248.791</b>	<b>148.442.917</b>	<b>64,54</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp366.523.725,00

**D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp366.523.725,00 dan Rp349.498.666,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	234.895.781	217.870.722	7,81
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	131.627.944	131.627.944	-
Beban Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah		-	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>366.523.725</b>	<b>349.498.666</b>	<b>4,87</b>
Beban Amortisasi Aplikasi		-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>		-	-
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>366.523.725</b>	<b>349.498.666</b>	<b>4,87</b>

*Defisit dari Kegiatan  
Non Operasional  
Rp5.041.000,00*

### **D.8 Surplus dari Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022*

<b>URAIAN</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Surplus/(defisit) Kegiatan Non Operasional			
Pelepasan Aset Non Lancar	5.151.000	2.629.500	95,89
Beban Kerugian Pelepasan Aset	110.000	0	0
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>5.041.000</b>	<b>2.629.500</b>	<b>91,71</b>

*Pos Luar Biasa  
Rp0,00*

### **D.9 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Saldo Pos Luar Biasa untuk TA 2023 dan 2022 adalah Rp0,00.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*

*Rp18.212.234.743,  
00*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2023 dan 01 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.212.234.743,00 dan Rp18.453.822.267,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban.

*Surplus(defisit) LO*

*Rp612.561.878,00*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp612.561.878,00 dan Rp996.361.120,00. Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Penyesuaian Nilai*

*Tahun Berjalan  
Rp0,00*

### **E.3 Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan**

Penyesuaian Nilai Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap untuk TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

*Transaksi Antar*

*Entitas*

*Rp(771.708.039,00)*

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai transaksi antar entitas pada tanggal 30 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(771.708.039,00) dan Rp(1.237.948.664,00).

*Ekuitas Akhir*

*Rp18.053.088.582,00*

### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.053.088.582,00 dan Rp18.212.234.743,00.

**F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

Berdasarkan Keputusan Menteri Akuntansi Nomor: 009/BALAP.5/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Akuntansi Nomor: 018/BALAP.5/2021 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberikan Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang yang Pada tahun 2023 terdapat perubahan Pejabat Pengelola Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Semula	Menjadi
Kuasa Pengguna Anggaran	Odyses Medwan Sinurat	Andri Dwinanto
Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Eko Budi Hariyanto	Adi Friandi
Pejabat Pembuat Komitmen	Retno Nur Indah	Arifin
Bendahara Pengeluaran	Yuni Rahma Khoirunnisa	Yuni Rahma Khoirunnisa